

INDONESIA CORRUPTION WATCH



POLEMIK MITRA DAN LEMBAGA PELATIHAN PROGRAM KARTU PRAKERJA

CATATAN KRITIS

Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja

TIM PENULIS

Egi Primayogha

Lalola Easter

Siti Juliantari

Tibiko Zabbar

Wana Alamsyah

Daftar Isi

Latar Belakang	3
Permasalahan	4
Metode	5
Hasil Analisis	6
1. Platform Digital dan Lembaga Pelatihan 6	
2. Tidak Ada Standar Harga 8	
3. Besaran Komisi Platform Digital Tidak Jelas 10	
4. Lembaga Pelatihan Berpotensi Tidak Memiliki Pengalaman 10	
Potensi Afiliasi Politik Lembaga Pelatihan	13
1. Skill Academy 12	
2. Vokraf 13	
3. Amithya Institute 14	
Kesimpulan	15

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga pada kondisi ekonomi. Banyak masyarakat terdampak COVID - 19 terpaksa harus kehilangan mata pencarian dan pengasilan akibat pandemi. Sementara masyarakat yang sudah miskin sebelum pandemi semakin tertekan dan bertambah miskin. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan dua dampak itu agar tidak menimbulkan masalah sosial yang lebih dalam. Sebaliknya, jika Pemerintah salah dalam mengambil langkah antisipasi, dengan mendesain kebijakan yang keliru, kondisi masyarakat terdampak akan semakin buruk mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat yang bergantung atau berharap pada bantuan dari pemerintah.

Program kartu pra kerja yang baru diumumkan Pemerintah diklaim merupakan salah satu langkah penanggulangan COVID-19. Namun sejumlah persoalan muncul sejak program ini diluncurkan pada pertengahan Maret 2020 lalu. Mulai dari desain program, kebijakan, proses pengadaan dan pemilihan mitra, hingga implementasi program yang menimbulkan banyak kontroversi. Meskipun dianggap program antisipasi pandemi, perlu diingat bahwa program kartu pra kerja ini sebenarnya merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu.



Laporan ini menganalisa berbagai persoalan yang muncul dalam program kartu pra kerja, khususnya ketika program ini diimplementasikan sebagai bentuk bantuan penanggulangan COVID-19 mengingat anggaran yang dikurcurkan untuk melaksanakan program ini sangat besar, yakni mencapai Rp 20 triliun. Analisa ini merupakan bagian dari peran partisipasi pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh ICW.

Permasalahan

Dasar aturan program kartu pra kerja adalah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja (Perpres 36/2020), dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan atas ketentuan Perpres prakerja (Permenko 3/2020) tersebut. Namun jika kita telisik lebih jauh, hampir tidak ada nuansa bahwa program ini ditujukan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 dari aspek dampak ekonomi.



Sementara desain program kartu pra kerja juga menimbulkan persoalan, terutama cara Pemerintah menggunakan pelatihan daring untuk membantu korban PHK melalui kerjasama dengan platform digital dan lembaga pelatihan daring. Dalam ketentuan Permenko 3/2020, diatur pemisahan antara mitra platform atau platform digital, dengan lembaga penyedia pelatihan daring

.Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menunjuk delapan platform digital yang bertugas melakukan kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring. Adapun delapan mitra platform digital yang telah ditunjuk pemerintah yakni Skill Academy, Pijar Mahir, Pintaria, Tokopedia, Sekolah.mu, Bukalapak, MauBelajarApa dan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Meskipun diatur sebagai entitas yang terpisah, dalam prakteknya beberapa mitra platform juga berperan sebagai penyedia pelatihan daring. Munculnya peran ganda mitra platform sekaligus sebagai lembaga pelatihan daring menambah deretan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pra kerja. Selain itu, masyarakat juga mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga pelatihan daring dan jenis pelatihan yang ditawarkan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Berkaitan dengan sejumlah persoalan di atas, ICW menelisik lebih jauh eksistensi mitra platform digital dan lembaga pelatihan yang tergabung dalam program kartu pra kerja dan memberikan penilaian kualitatif atas peran mereka dalam penyelenggaraan pelatihan daring, yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir.

Metode

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

01 MENGHIMPUN DATA DARI SETIAP SITUS PLATFORM DIGITAL

- Tokopedia <https://m.tokopedia.com/kartu-prakerja/partner>
- Bukalapak <https://m.bukalapak.com/kartu-prakerja>
- Pijar Mahir <https://pijarmahir.id/filter-materi/kartu-prakerja>
- Sekolah.mu <https://www.sekolah.mu/kartuprakerja/>
- Pintaria <https://www.pintaria.com/kartuprakerja/kursus>
- Skill Academy <https://skillacademy.com/courses/CAT-9J9867CS>
- MauBelajarApa <https://maubelajarapa.com/kartuprakerja/>
- Kemnaker <https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja>

02 WAKTU PENGUMPULAN DATA 5 - 14 MEI 2020

03 DATA DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN NAMA PELATIHAN, LEMBAGA PELATIHAN, PLATFORM DIGITAL DAN HARGA

04 PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN MANDIRI DENGAN KETERBATASAN PENELITI YANG TIDAK DAPAT MENGAKSES SELURUH DATA PELATIHAN DALAM SITUS PRA KERJA TANPA AKUN YANG TERDAFTAR.



Hasil Analisis

1. PLATFORM DIGITAL DAN LEMBAGA PELATIHAN

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 850[1] jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan[2], dimana 111 berbentuk lembaga dan 36 berbentuk individu yang tersebar dalam delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa dan Kemnaker.

Untuk 36 lembaga pelatihan yang berbentuk individu, seluruhnya terdaftar di platform digital Skill Academy. Dimana 10 diantaranya merupakan individu yang masih terkait dengan Ruang Guru dan Skill Academy, diantaranya, Iman Usman selaku Pendiri dan Direktur Produk dan Kerjasama Ruangguru, Arman Wiratmoko selaku Vice President of Corporate Strategy and Finance Ruang Guru, dan Adilla Inda Diningsih selaku SVP Sales & Marketing Ruangguru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dalam pasal 25 ayat (1), disebutkan bahwa pelatihan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau pemerintah. Dalam aturan tersebut, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang bersifat individu.

Bahkan dalam pasal lain, pasal 26, juga disebutkan serangkaian kriteria yang harus di penuhi lembaga pelatihan, yaitu mulai dari memiliki kerjasama dengan platform digital hingga memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem online single submission (OSS).

Kriteria tersebut tentu akan sulit dipenuhi jika lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan adalah individu.

[1] Daftar lengkap 850 jenis pelatihan dapat dilihat pada table 1 lampiran
[2] Daftar lengkap 112 lembaga pelatihan dapat dilihat pada tabel 2 lampiran

Grafik 1 Sebaran Pelatihan Berdasarkan Platform Digital



Dari 850 jenis pelatihan, platform digital Tokopedia yang paling banyak menawarkan pelatihan, yaitu 196 pelatihan. Untuk Pijar Mahir dan Bukalapak, masing – masing menawarkan 136 pelatihan, MauBelajarApa sebanyak 99 pelatihan, Kemnaker sebanyak 90 pelatihan, Pintaria sebanyak 74 pelatihan, Sekolah.mu sebanyak 69 pelatihan dan paling sedikit Skill Academy sebanyak 50 pelatihan

Tabel 3: Lembaga Pelatihan Sekaligus Platform Digital/Kolaborator



Dari 850 jenis pelatihan yang ditawarkan, sebanyak 137 pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang juga merupakan platform digital atau kolaborator dalam program kartu prakerja. Skill Academy, selain menjadi platform digital dalam waktu yang bersamaan juga menjadi lembaga pelatihan pada 42 jenis pelatihan, dimana pelatihan tersebut didaftarkan melalui platform digital Tokopedia.

Hal serupa juga terjadi pada platform digital Sekolah.mu dan Pijar Mahir. Di waktu yang bersamaan kedua platform ini juga berperan sebagai platform digital dan lembaga pelatihan. Untuk Sekolah.mu dari 69 jenis pelatihan yang ditawarkan dalam platform digital ini, sebanyak 12 pelatihan tercatat didaftarkan pada lembaga mereka sendiri. Begitu juga dengan Pijar Mahir, dari 136 pelatihan yang ditawarkan melalui platform digital ini sebanyak 10 pelatihan didaftarkan di lembaga mereka sendiri.

Sedangkan platform digital Pintaria juga mendaftarkan diri sebagai lembaga pelatihan pada platform digital Tokopedia pada 14 jenis pelatihan.

Lebih lanjut, HarukaEdu adalah lembaga yang menyediakan teknologi bagi perguruan tinggi, perusahaan/institusi maupun individu dalam mendesain pembelajaran online. Sedangkan Pintaria adalah portal *lifelong learning* milik HarukaEDU yang menawarkan produk kuliah *online* dan *blended learning* serta berbagai program kursus untuk individu[3]. Dalam program kartu prakerja, HarukaEdu menawarkan 24 jenis pelatihan melalui platform digital Pintaria. Lagi-lagi hal ini memperlihatkan di waktu bersamaan platform digital juga merangkap menjadi lembaga pelatihan.

Peran ganda yang dilakukan oleh Skill Academy, Sekolah.mu, Pijar Mahir, dan Pintaria, yaitu menjadi platform digital dan lembaga pelatihan dalam waktu bersamaan, tentu berpotensi melahirkan konflik kepentingan dalam pengelolaan program kartu prakerja. Karena bagaimana mungkin platform digital yang memiliki tugas kurasi dan pengawasan, melakukan hal tersebut pada lembaganya sendiri di waktu yang bersamaan.

Sebagaimana diatur dalam Perpres 36/2020, yang diperinci dalam Permenko 3/2020, dijelaskan pada pasal 50, bahwa platform digital memiliki tugas diantaranya, melakukan kurasi lembaga pelatihan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan. Bagaimana mungkin sebuah lembaga melakukan kurasi dan pengawasan atas dirinya sendiri di waktu yang bersamaan.

Keadaan tersebut dapat bertambah parah karena tidak ada aturan jelas yang mengatur pemisahan peran dan tugas platform digital dan lembaga pelatihan. Sehingga kemungkinan platform digital menjadi lembaga pelatihan dalam waktu bersamaan di masa akan datang akan semakin besar.

Lebih lanjut, untuk lembaga pelatihan G2 Academy dan Hacktiv8 masing-masing menawarkan 19 pelatihan dan 16 pelatihan. Kedua lembaga ini merupakan kolaborator dalam pengembangan awal program kartu pra kerja. Sebagaimana di sebutkan dalam website bahwa program pra kerja adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta. Pada tahap awal pengembangan situs program kartu pra kerja banyak dibantu oleh Tokopedia, Skill Academy, OVO, Hacktiv8, MauBelajarApa, Link Aja, dan G2 Academy.

[3]HarukaEDU, <https://harukaedu.com/pintaria/> diakses pada 13 Mei 2020 pukul 23:00 WIB

Peran maupun tugas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut sebagai kolaborator tidak jelas, sebab dalam aturan terkait program kartu prakerja tidak disebutkan adanya peran lain selain platform digital dan lembaga pelatihan. Dalam website prakerja pun tidak ada informasi lebih lanjut sejauh mana dan dalam bentuk apa bantuan yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Selain sejumlah hal di atas, ditemukan juga lembaga pelatihan yang tergabung dalam platform digital, dibentuk oleh sesama lembaga pelatihan lain yang juga tergabung dalam platform digital yang berbeda. Seperti Sekolah Pintar.id yang bergabung dengan platform digital Kemenaker, dibentuk oleh lembaga pelatihan Babastudio yang juga tergabung melalui platform digital Tokopedia. Tentu ini juga menimbulkan pertanyaan.

2. TIDAK ADA STANDAR HARGA

Dari 850 pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital memiliki rentang harga mulai dari Rp0 (gratis) hingga Rp1.000.000. Beberapa pelatihan diantaranya memiliki jenis pelatihan yang serupa dengan harga yang berbeda-beda. Contohnya pelatihan terkait penulisan CV.

Tabel 4: Pelatihan Terkait Penulisan CV

No	Jenis Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Harga
1	Bedah CV untuk Sekolah ke Luar Negeri, Beasiswa, dan Lamaran Kerja	Skill Academy	Rp135.000
2	Cara Menulis CV yang Dilirik HRD	Pintaria	Rp150.000
3	Cara Menulis CV yang Dilirik HRD	HarukaEDU	Rp150.000
4	Bedah CV untuk Sekolah ke Luar Negeri Beasiswa dan Lamaran Kerja	Iman Usman, Co-Founder Ruangguru	Rp168.000
5	Webinar (4 Sessions) Belajar Membuat CV dan Mempersiapkan Interview Kerja	Speak Project	Rp175.000
6	Teknik Membuat CV Keren	Global Entrepreneur Talent Incubator (GETI)	Rp200.000
7	Webinar: Surat Lamaran dan CV yang Menjual	Daily Meaning, People Development Consultant	Rp200.000
8	Belajar CV dan Trik Interview Killer	Inspirasi Indonesia	Rp287.000
9	Tips Pembuatan CV & Interview Agar Cepat Diterima Kerja	Pakar	Rp300.000

Tabel di atas memperlihatkan untuk jenis pelatihan CV ditawarkan dengan harga paling murah Rp 135.000 hingga paling mahal adalah Rp 300.000. Diantara 9 pelatihan terkait dengan CV, ada jenis pelatihan yang benar – benar sama jenis pelatihannya, yaitu *Bedah CV untuk Sekolah ke Luar Negeri, Beasiswa, dan Lamaran Kerja* yang ditawarkan oleh Skill Academy dan Imam Usman (Co-Founder Ruangguru) dengan harga yang berbeda yaitu Rp 135.000 dan Rp 168.000. Padahal jenis pelatihan ini dapat dikatakan diselenggarakan oleh instansi yang sama, sebab Imam Usman dan Skill Academy sama – sama terkait dengan Ruangguru.

Pelatihan lainnya, *Cara Menulis CV yang dilirik HRD*, ditawarkan oleh Pintaria dan HarukaEDU dengan harga yang sama, yaitu Rp 150.000. Pintaria dan HarukaEDU adalah instansi yang sama. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Pintaria merupakan bagian dari HarukaEDU.

Contohnya lainnya, jenis pelatihan bahasa Inggris bagi ojek online, ditawarkan oleh dua lembaga pelatihan yaitu Cakap dengan harga Rp250.000 sedangkan English Today dengan harga Rp500.000 untuk sekali pelatihan. Selain itu, Cakap juga memiliki program tiga bulan mahir Bahasa Inggris untuk ojek dengan biaya Rp 600.000 yang besarnya tidak jauh berbeda dengan English Today untuk satu kali pelatihan.

Tabel 5: Pelatihan Terkait Desain Grafis

No	Jenis Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Harga
1	Belajar Desain Grafis dengan Mudah menggunakan Adobe Photoshop	Bimo Satrio Mukti, Professional Creative Designer	Rp227.000
2	Desain Grafis Dasar	Pro-Digi	Rp250.000
3	Desain Grafis Kelas Dunia Dengan Adobe Illustrator dan Photoshop	G2 ACADEMY	Rp350.000
4	Webinar: Desain Grafis Kelas Dunia dengan Adobe Illustrator Dan Photoshop	Bootcamp Coding	Rp350.000
5	Desain Grafis untuk Pemula dengan Sharon Joetama	MyEduSolve	Rp499.000
6	Menjadi Freelancer Desain Grafis	SekolahDesain.id	Rp500.000
7	Desain Grafis	Lpk Tikom	Rp750.000
8	Junior Desain Grafis	Blk Komunitas Ponpes Al-Aitaam	Rp1.000.000
9	Desain Grafis Muda	Lpk Equalita Learning Centre	Rp1.000.000

Perbedaan harga yang cukup jauh juga terlihat dalam pelatihan terkait desain grafis. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp 227.000 hingga Rp 1.000.000. Ketiadaan standar harga juga dapat dilihat dari diskon-diskon yang diberikan oleh platform digital pada sebuah pelatihan. Diskon ini dapat berubah-ubah dalam hitungan hari. Sehingga beberapa pelatihan yang semula dipatok dengan harga lebih dari Rp1.000.000 menjadi dibawah itu atau sama. Hal ini sepertinya juga dikarenakan program kartu pra kerja yang alokasi pelatihannya Rp1.000.000.

Tidak adanya transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana dalam mengelola program kartu prakerja membuat harga yang dipatok untuk pelatihan yang serupa berbeda-beda dan hanya berdasarkan standar lembaga pelatihan. Padahal dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan daring ini adalah bersumber dari APBN.

3. BESARAN KOMISI PLATFORM DIGITAL TIDAK JELAS

Dalam sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan program pra kerja, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besaran komisi yang berhak diterima platform digital. Mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Permenko 3/2020 dinyatakan bahwa :

“Platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari Lembaga Pelatihan yang melakukan kerja sama”.

Sementara itu pada Pasal 52 ayat (2) Permenko 3/2020 dinyatakan bahwa :

“Besaran komisi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat persetujuan dari Manajemen Pelaksana”.

Dari dua pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai harga wajar yang berhak didapatkan oleh platform digital. Apabila mekanisme komisi jasa diatur melalui Perjanjian Kerja Sama, maka pemerintah harus membuka informasi tersebut ke publik. Sebab, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa :

“Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi perjanjian badan publik dengan pihak ketiga”

Namun sayangnya berdasarkan pemantauan ICW Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak dibuka ke publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi publik bahwa terdapat potensi kecurangan yang terjadi apabila perjanjian tersebut tidak transparan.

Di sisi lain, ketiadaan batas wajar mengenai komisi jasa yang diterima oleh platform digital mengakibatkan setiap platform memiliki standarnya masing-masing. Selain itu kurangnya transparansi dalam penetapan besaran komisi juga berpotensi platform digital mendapat komisi yang tidak sewajarnya. Sehingga keadaan tersebut berpotensi besar merugikan peserta program kartu prakerja.

Seperti yang terjadi pada platform maubelajarapa.com. Di dalam situs tersebut dijelaskan bahwa terdapat biaya administrasi dan pemasaran sebesar 20 persen dari tiket kelas yang terjual melalui maubelajarapa.com. Sayangnya penyampaian informasi mengenai biaya di tujuh platform digital lainnya tidak tersedia.

4. LEMBAGA PELATIHAN DIDUGA TIDAK MEMILIKI PENGALAMAN

ICW juga melakukan sampling acak untuk melihat latar belakang dari lembaga pelatihan yang ikut serta dalam program kartu pra kerja. Dari pengecekan acak ini, setidaknya ada 2 lembaga yang latar belakangnya dipertanyakan dalam melakukan pelatihan. Pertama Boleh Dicoba Digital. Berdasarkan penjelasan di website Boleh Dicoba Digital adalah :

"offers services in digital marketing to reflect on growth in social media & online sales. Built for today's market, we value being practitioners on every digital platform we oversee and are focused on driving real business results"

Terjemahan bebas :

"menawarkan layanan dalam pemasaran digital untuk mencerminkan pertumbuhan di media sosial & penjualan online. Dibangun untuk pasar saat ini, kami menghargai menjadi praktisi di setiap platform digital yang kami awasi dan berfokus pada mendorong hasil bisnis nyata".

Layanan yang diberikan oleh lembaga ini adalah E-commerce Web Development, Digital Marketing & Digital Campaign Optimizing, Digital Marketing & Digital Campaign Strategy, dan Digital Advertisement.[4] Berdasarkan penelusuran ke website dan akun nstagram @bolehdicobadigital lembaga ini tidak memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan secara online maupun offline.

Tabel 6: Lembaga Pelatihan Dipertanyakan Pengalamannya

No	Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Harga
1	Memasang Iklan di Facebook dan Instagram Secara Baik dan Benar	Boleh Dicoba Digital	Rp300.000
2	Junior Desain Grafis	Blk Komunitas Ponpes Al-Aitaam	Rp1.000.000
3	Digital Strategist 3D Animator Copywriter Youtube Content Creator Graphic Designer	Vokraf	Rp 300.000

Kedua, lembaga pelatihan BLK Komunitas Ponpes Al-Aitaam yang memberikan pelatihan junior desain grafis. Lembaga ini dipertanyakan pengalamannya dalam melakukan pelatihan online dengan materi junior desain grafis. Dari penelusuran melalui www.google.com, Yayasan Pendidikan Al-Aitaam[5] merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak - kanak hingga politeknik. Namun lembaga ini tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan secara online.

Kegiatan, lembaga pelatihan Vokraf yang menyelenggarakan 5 pelatihan yang terdaftar di Kemenaker. Berdasarkan hasil pemantauan, situs vokraf.com baru terbentuk pada tanggal 28 Agustus 2019 sedangkan grand launching Vokraf sebagai platform edukasi online pada tanggal 21 Februari 2020 atau tepat tujuh hari sebelum munculnya Perpres 36/2020. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah lembaga ini memang memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan sehingga lolos seleksi kurasi oleh manajemen pelaksana atau lembaga ini sengaja dibentuk untuk mengikuti program kartu prakerja?

Jika mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dalam pasal 2 disebutkan bahwa, tujuan program kartu pra kerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut jika lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan pun masih dipertanyakan pengalaman dan kemampuannya dalam memberikan pelatihan.

Potensi Afiliasi Politik Lembaga Pelatihan

Dari beberapa lembaga pelatihan yang disampling acak, ditemukan setidaknya tiga lembaga yang terafiliasi secara politik. Lembaga tersebut yaitu Skill Academy, Vokraf, dan Amithya Institute.

1. SKILL ACADEMY

Skill Academy adalah portal pembelajaran yang digagas oleh Ruangguru. Ruangguru adalah perusahaan teknologi yang membawahi Skill Academy. Ruangguru tercatat dalam Dirjen AHU Kemenkumham sebagai PT Ruang Raya Indonesia.

Salah satu pendiri Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara. Belva mendirikan Ruangguru bersama Muhammad Iman Usman. Dia adalah mantan Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo. Posisi tersebut ia jabat selama 5 bulan. Belva mengundurkan diri dari jabatannya saat polemik pra-kerja muncul. Dia ditengarai memiliki konflik kepentingan dalam program kartu pra-kerja karena masih menjabat posisi Direktur Utama PT Ruang Raya Indonesia.



Dalam akta PT Ruang Raya Indonesia, terdapat nama yang muncul saat perubahan akta kedua tertanggal 19 Januari 2015 yaitu Willson Cuaca. Willson Cuaca adalah co-founder dan managing partner East Ventures, sebuah venture capital firm. East Ventures diketahui mendanai sejumlah startup seperti Tokopedia, Traveloka, dan BerryBenka. Adapun Tokopedia menjadi salah satu platform digital program kartu pra-kerja.

Saham mayoritas PT Ruang Raya Indonesia dikuasai oleh Ruangguru Pte. Ltd, perusahaan yang terdaftar di Singapura. Pemilik Ruangguru Pte. Ltd yaitu:

Tabel 7: Kepemilikan Ruangguru Pte. Ltd

Nama	Lokasi
Asia Impact Investment Fund I Pte Ltd	Singapura
East Venture Sea 1 Pte Ltd	Singapura
East Venture Sea 2 Pte Ltd	Singapura
GGV VII Investment Pte Ltd	Singapura
ASEAN China Investment Fund III	Cayman Island
Isla Vista Group Ltd	Virgin Island
Tanoto Foundation	Cayman Island
Mexsteel Holding Limited	Virgin Island
Alvin Francis Tamie Loh	Indonesia
Adilla Ina Diningsih	Indonesia

Pemilik Saham Ruangguru Pte. Ltd, ACRA, Kompas

Posisi Belva yang Ketika itu masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI diduga menimbulkan konflik kepentingan dalam pemilihan SkillAcademy sebagai mitra platform program kartu pra-kerja. Relasi secara politik pihak-pihak lain yang tercantum sebagai pengurus atau pemilik saham PT Ruang Raya Indonesia atau Ruangguru Pte. Ltd patut ditelusuri lebih lanjut.

2. VOKRAF

Pendiri Vokraf terafiliasi dengan tim kampanye pasangan Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin. Vokraf atau PT. Kolaborasi Edukasi Nusantara merupakan platform edukasi online yang berfokus untuk meningkatkan kemampuan talenta muda sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh industri kreatif.[6]

Tabel 8: Pelatihan yang Diselenggarakan Oleh Vokraf

No	Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Harga	Platform Digital
1	Digital Strategist	Vokraf	Rp300.000	Kemnaker
2	3D Animator	Vokraf	Rp300.000	Kemnaker
3	Copywriter	Vokraf	Rp300.000	Kemnaker
4	Youtube Content Creator	Vokraf	Rp300.000	Kemnaker
5	Graphic Designer	Vokraf	Rp300.000	Kemnaker

[6] Vokraf, <https://vokraf.com/about> diakses pada 14 Mei 2020 pada 11:30 WIB.

Pendiri Vokraf, Fina Silmi Febriyani merupakan bagian dari tim direktorat konten kampanye Joko Widodo sejak Januari 2018 hingga 2019.[7] Berdasarkan hasil pemantauan, situs vokraf.com baru terbentuk pada tanggal 28 Agustus 2019 atau sekitar delapan bulan yang lalu. Sedangkan, grand launching Vokraf sebagai platform edukasi online pada tanggal 21 Februari 2020 atau tepat tujuh hari sebelum munculnya Perpres 36/2020. Salah satu yang diundang dalam acara grand launching Vokraf yaitu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa grand launching yang dibuat oleh Vokraf seolah-olah ingin melegitimasi bahwa Vokraf adalah sebagai platform edukasi online, sehingga dapat dikategorikan sebagai lembaga pelatihan yang berhak untuk mengikuti program pra kerja. Selain Vokraf, lembaga pelatihan lain yang diduga memiliki afiliasi politik adalah, Amithya Institute.

3. AMITHYA INSTITUTE

Amithya Institute, bagian dari Amithya Hotels and Resort, adalah sebuah lembaga pelatihan yang memberikan keterampilan dan pendidikan di bidang perhotelan (hotelier) dan jasa boga (food and beverage). Amithya Institute berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang peresmianya pada 9 Maret 2020, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Prawansa.[8]

Tabel 9: Pelatihan yang Diselenggarakan Oleh Amithya Institute

No	Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Harga	Platform Digital
1	Dasar-dasar Housekeeping	Amithya Institute	Rp1.000.000	Pijar Mahir
2	Dasar-dasar Front Office	Amithya Institute	Rp1.000.000	Pijar Mahir
3	Pengantar untuk Pelayanan Makanan (Food and Beverage)	Amithya Institute	Rp1.000.000	Pijar Mahir



[7] Laman LinkedIn Fina Silmi Febriyani, <https://id.linkedin.com/in/fina-silmi-febriyani>, diakses pada 8 Mei 2020

[8] Diskominfo Provinsi Jawa Timur, "Gubernur Amithya Institute Diharapkan Bisa Menciptakan Lapangan Kerja Baru", 9 Maret 2020, <http://kominformprov.go.id/read/umum/gubernur-amithya-institute-diharapkan-bisa-menciptakan-lapangan-kerja-baru>, diakses pada 8 Mei 2020

CEO Amithya Institute, Rucita Permatasari atau dikenal pula dengan nama Chita Choo, merupakan calon anggota legislatif tahun 2019.[9] Ia mencalonkan [SR1] diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, lewat Partai Golkar.[10] Selain itu, Rucita Permatasari juga merupakan Wakil Bendahara Golkar Jawa Timur.[11] Sebagaimana diketahui, Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi pemerintah. Ketua Partai Golkar periode 2019-2024 adalah Airlangga Hartanto yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Program pra kerja nyatanya juga berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Padahal lembaga yang cocok untuk mengurus bidang ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.

Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa pemilihan Amithya Institute sebagai salah satu lembaga penyedia pelatihan dalam program pra kerja, terkait dengan posisi CEO-nya Rucita Permatasari, yang pernah menjadi Caleg DPRD Jawa Timur dan merupakan Bendahara Partai Golkar Jawa Timur.

KESIMPULAN

Dari hasil penelusuran dan analisis data yang ICW lakukan terhadap mitra platform digital dan lembaga pelatihan, maka dapat kami simpulkan bahwa :

1. Tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan
2. Potensi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring dalam program kartu prakerja
3. Tidak adanya standar yang jelas mengenai lembaga pelatihan yang dinilai pantas dan bisa bermitra dalam program kartu prakerja
4. Ditemukan adanya dugaan afiliasi politik dalam sejumlah lembaga pelatihan dengan para pihak dalam platform digital
5. Sejumlah lembaga pelatihan diragukan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring

[9] Tribunnews Suryamalang, "Rucita Permatasari, Gadis Surabaya Yang Ingin Majukan Malang Raya Lewat 3 Bidang", 17 Januari 2019, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/01/17/rucita-permatasari-gadis-surabaya-yang-ingin-majukan-malang-raya-lewat-3-bidang?page=all>, diakses pada 8 Mei 2020

[10] Golkar Muda Bangkit, "Caleg DPRD Jatim Cita Choo: Butuh Perubahan Sistem Politik di Mana Korupsi Tinggi", 29 Januari 2019, <https://www.golkarmudabangkit.com/2019/01/29/caleg-dprd-jatim-cita-choo-butuh-perubahan-sistem-politik-dimana-korupsi-tinggi/>, diakses pada 8 Mei 2020

[11] Surya.co.id, "Pebisnis dan Politisi Bagi Sembako Kepada Lansia, Janda, dan OPD di Pinggiran Surabaya", 21 April 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/21/pebisnis-dan-politisi-cantik-bagi-sembako-kepada-lansia-janda-dan-opd-di-pinggiran-surabaya>, diakses pada 14 Mei 2020